

RINGKASAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Persoalan dalam penegakan hukum mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes adalah perbedaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus yang sama, area hukum yang sama dan dasar hukum yang sama. Hal ini akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris penelitian ini menganalisa lebih mendalam tentang permasalahan pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes terjadi adanya kesenjangan dalam penjatuhan pidana karena hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS dengan melihat latar belakang dan motif anak melakukan tindak pidana persetubuhan. Selain itu juga hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan anak melakukan tindak pidana persetubuhan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Brebes disebabkan oleh: (1) faktor keadaan hakim berupa sifat subjektif dan objektif, (2) faktor perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pidana, (3) faktor sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental atau Civil law System* dan (4) faktor tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya dijadikan sebagai pedoman saja.

Kata kunci : *Disparitas Pidana, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan*

SUMMARY

Indonesia is a country based on law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. As a state of law, the government must ensure law enforcement and the achievement of legal objectives. The problem in law enforcement of criminal disparity againsts children who commite crimes of sexual intercourse decision no. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, and No. 9/Pid.Sus - Anak/2019/PNBbs at the Brebes District Court is the difference of the judges in imposing criminal sanction on children who commite crimes of sexual intercourse in the case, area of law and the same legal basis. It will cause public trust in the judiciary to weaken and will create a stigma on the sustainability of the law in Indonesia.

The aim of this study is to analyze the judge's views on criminal disparities against children who commite crimes of sexual intercourse and the factors that are cause criminal disparity disparity of decision no. 6/Pid.Sus-anak/2019/PNBbs, Number 7/Pid.Sus-anak/2019/PNBbs, and Number 9/Pid.Sus-anak/2019/PNBbs at the Brebes District Court. By using an empirical yuridis approach, this study analyzes in more depth the problem of judge's views regarding criminal disparities against children who commite crimes of sexual intercourse and the factors that are cause criminal disparities decisions Number 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, Number 7 / Pid.Sus-Child/2019/PNBbs, and Number 9/Pid.Sus-Child/2019/PNBbs at the Brebes District Court.

Based on the result of the study, the judge's views regarding the criminal disparity of children who commite the crime of sexual intercourse decision no. 6/Pid.Sus-anak/2019/PNBbs, Number 7/Pid.Sus-anak/2019/PNBbs, and Number 9/Pid.Sus-anak/2019/PNBbs at the Brebes District Court there was a tendency in imposing a crime because the judge made decisions based on the Community Research Report from BAPAS by looking at the background and motives of the child committing the crime of sexual intercourse. in addition, the judge considers the aggravating and mittigating matters for children to commit the crime of sexual intercourse which aim to provide guidance children to improve themselves and does not repeat their mistakes in the future. So, this is the cause of criminal disparities. The criminal disparity against the children who commite crime of sexual intercourse in the Brebes District Court is caused by: (1) the the factor of judge's condition in the form of subjective and objective, (2) legislation factors that do not provide criminal guidelines, (3) factor of legal system in Indonesiawhich adheres to continental European legal sytem or civil law system and (4) factor of the public prosecutor that is only used as a guide.

Keywords: Criminal Disparity, Children, The Crime of Sexual Intercours